



Paripurna RAPBD 2023 Ditunda

Peserta Rapat Tak Kuorum

PONTIANAK - DPRD legislatif.

Kalbar menunda Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Kalbar terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat paripurna ditunda lantaran tidak mencapai kuorum. Jumlah anggota DPRD Kalbar yang hadir tidak memenuhi syarat



Suriansyah

sebagaimana diatur dalam tata tertib. Muncul desas-desus bahwa pemicunya yakni karena ada disharmoni antara eksekutif dan

Terhadap hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menyebutkan bahwa penundaan paripurna tersebut karena tidak memenuhi kuorum saja. "Se-suai tata tertib DPRD, untuk paripurna yang tidak mengambil keputusan diperlukan kuorum kehadiran anggota seperdua jumlah anggota. Namun yang hadir tidak mencukupi, makanya tidak bisa berlanjut," ucapnya.

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

Paripurna RAPBD 2023 Ditunda

Sambungan dari halaman 1

Walaupun ditunda, politisi Gerindra Kalbar ini optimistis penundaan ini tak akan membuat molor penetapan APBD asal dilakukan secara tertib. Sebab, penetapan APBD tahun 2023 paling lama hingga 30 November. "Tergantung kesiapan anggota badan anggaran, anggota DPRD dan TAPD Pemprov," katanya.

Dia menyebutkan bahwa keterlambatan juga bisa terjadi di sisi TAPD Pemprov Kalbar. Misalnya saja, pengambilan keputusan di TAPD tidak hadir dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Badan Anggaran. Untuk itulah, menurutnya pengambil keputusan, minimal Sekda Kalbar harus selalu hadir.

Terpisah, Sekda Kalbar, Harisson menjelaskan bahwa paripurna hari ini sedianya akan digelar dengan agenda jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kalbar sebelumnya. "Karena tidak kuorum, kembali dilanjutkan Senin 24 Oktober," kata Harisson.

Menurutnya, jika sidang tidak ditunda, pembahasan Raperda APBD mestinya bisa langsung dilanjutkan dengan pembahasan per komisi.

BK Berikan Tanggapan

Sementara, Ketua Badan Kehormatan Dewan, Irsan menyebutkan bahwa ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD karena disebabkan berbagai hal. Salah

satunya izin sakit, sedang di luar kota hingga mengikuti kegiatan Bimtek di luar Kalbar. "Seperti fraksi Golkar kan sedang Bimtek, kemudian teman-teman yang lain ada yang izin sakit, dan berada di luar daerah karena baru selesai reses," ucapnya.

Irsan memaklumi ketidakadiran anggota DPRD. Dia pun terus mengimbau agar kedisiplinan anggota DPRD terus ditingkatkan, terutama paripurna. "Kami berharap tingkat kehadiran kawan-kawan untuk disiplin sesuai jadwal banmus. Jangan sampai dalam sidang, baik komisi, rapat komisi, lebih paripurna tidak hadir sehingga mengganggu jadwal yang ditetapkan," pungkasnya. (*den*)